BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Perkembangan pemerintahan mempunyai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bersifat dinamis. Pemerintah dibentuk oleh warga masyarakat dengan fungsi utama melayani masyarakat.

Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelengaraan kenegaraan memerlukan dana untuk membiayai fungsi tersebut, mempunyai kewajiban dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Disisi lain masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi tersebut, yang bisa ditunjukan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan Negara.

Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Peran Pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara (*budgeter*) dan berfungsi sebagai pengatur (*regulatory*) atau sebagai penyalaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah, yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Untuk melaksanakan

kewajiban perpajakannya Wajib Pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan, salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pajak merupakan iuran kas kepada Negara yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh) dimana Objek Pajak dari Pajak Penghasilan adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

PT INTI (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menganut *Self Assessment System*, baik itu untuk wajib pajak pribadi dalam hal ini adalah

Pegawai, Manajemen dan Direksi maupun wajib pajak badan yaitu PT INTI itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan pada PT. INTI yang kemudian penulis tuangkan dalam laporan kerja praktek. Laporan ini penulis beri judul : **"Tinjauan Atas Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek ini yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek yang berkaitan dengan prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan pada PT. INTI.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari kegiatan kerja praktek ini secara umum adalah kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis tentang dunia kerja secara nyata. Sedangkan tujuan khusus yang penulis harapkan dari kegiatan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan pada PT. INTI.

1.3 Metode Kerja Praktek

Metode kuliah kerja praktek yang dilakukan penulis dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ini adalah metode *block release* yaitu metode pelaksanaan kuliah kerja praktek dalam satu periode tertentu.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Adapun gambaran mengenai lokasi dan waktu kerja praktek adalah sebagai berikut :

Lokasi	: Jl. Moch.Toha No.77 Bandung 40253
Tempat Pelaksanaan	: Bagian Pajak dan Asuransi Divisi Keuangan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
Waktu	: 2 Agustus 2010 s.d 6 September 2010

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Bulan	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	Kegiatan minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Memperoleh surat izin Kerja Praktek dari kampus																								
2	Mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek																								
3	Mengajukan Surat Permohonan kerja Praktek ke perusahaan																								
4	Menentukan tempat Kerja Praktek																								
5	Meminta surat pengantar kepada perusahaan																								
6	Melaksanakan kerja praktek di perusahaan																								
7	Pengambilan dan pengumpulan data dari perusahaan																								
8	Menyiapkan laporan kerja praktek																								
9	Bimbingan perusahaan																								
10	Penyusunan laporan Kerja Praktek																								
11	Bimbingan dikampus																								
12	Penyempurnaan laporan Kerja Praktek																								
13	Pengadaan laporan Kerja Praktek																								